

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI
SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN
RECHTSVERVOLGING*)
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh
GALUH LARASATI
NIM : E 0004171

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING*)
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)**

Disusun oleh :

GALUH LARASATI
NIM : E 0004171

Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing

EDY HERDYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131472194

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING*) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Disusun oleh :
GALUH LARASATI
NIM : E 0004171

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :
 Hari : Selasa
 Tanggal : 25 Maret 2008

TIM PENGUJI

1. Kristiyadi, S.H., M.Hum. :

Ketua

2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum :

Sekretaris

3. Edy Herdyanto, S.H., M.H. :

Anggota

MENGETAHUI
Dekan,

Moh. Jamin, S.H, M.Hum.
NIP.131 570 154

ABSTRAK

Galuh Larasati, 2008. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING*) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) serta apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Jenis penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang membahas tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Jenis data sekunder yaitu data yang didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tertier dalam penulisan ini adalah Kamus Hukum.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) adalah bahwa apabila yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Dalam kasus yang penulis teliti, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena terdakwa mengalami gangguan jiwa. Menurut penulis putusan yang dijatuhkan adalah sudah tepat karena setelah melalui proses persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, didapat keyakinan hakim bahwa terdakwa benar mengalami gangguan kejiwaan seperti terdapat dalam rumusan Pasal 44 dimana terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Selain itu dengan memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara untuk segera dilakukan pengobatan secara rutin oleh keluarganya, adalah sudah tepat karena tindakan tersebut dimaksudkan selain untuk menolong kesembuhan Terdakwa juga di dalamnya ada sifat preventif atas kemungkinan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkannya terhadap masyarakat.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. *Allah SWT, Sang Pencipta Alam Semesta.*
2. *Teruntuk orang tuaku Ayahanda Sutriadi Yahya dan Ibunda Sri Wahyuni tercinta atas segala bimbingan, doa dan cinta yang senantiasa tercurah untukku.*
3. *Teruntuk adikku tersayang Umbu Damar Yudhistira atas segala cinta kasih dan dukungannya*
4. *Teruntuk Dian Akbar Wicaksana atas semua perhatian, dukungan, doa, cinta dan kasih sayang yang senantiasa diberikan untukku.*
5. *Teman-temanku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan semangat dan kemudahan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Alhamdulillah atas terselesaikannya penulisan hukum sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING*) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan penulisan hukum ini yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasehat selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan bekal ilmu bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Keluargaku tercinta Bapak Sutriadi Yahya dan Ibu Sri Wahyuni serta adikku Umbu Damar Yudhistira yang selalu memberikan curahan kasih sayang yang tidak pernah berhenti, dorongan, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Kakek, nenek dan saudara-saudara yang lain yang telah banyak memberikan perhatian yang besar dan kasih sayang pada penulis.
7. Dian Akbar Wicaksana, terima kasih untuk semuanya selama ini atas dukungan, doa, perhatian dan kasih sayangnya.
8. Teman-temanku terkasih "cumi-cumi" (Fe-3a, Gana, Puput, Sovie, Teti, Ambar, Ega, Karin, Rina, Via) terima kasih telah mengisi masa kuliahku dan untuk persahabatan yang indah ini
9. Teman-temanku Ucik, Rio, Ardi terima kasih sudah memberikan doa, semangat dan dukungannya
10. Semua temen-temen angkatan 2004, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam penulisan hukum ini.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Maret 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

DAFTAR GAMBAR.....	x
--------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Pendekatan Penelitian.....	7
4. Jenis Data.....	8
5. Sumber Data.....	8
6. Teknik Pengumpulan Data.....	9
7. Analisis Data.....	10
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan Umum tentang Putusan.....	12
a. Pengertian Putusan.....	12
b. Jenis-jenis Putusan Pengadilan.....	12
c. Syarat Sah dan Isi Putusan.....	15
2. Tinjauan tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian Pidana.....	17
a. Pengertian Pembuktian.....	17
b. Macam-macam Alat Bukti.....	18
c. Sistem Pembuktian.....	22
3. Tinjauan Umum tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum (<i>ontslag van rechtsvervolging</i>).....	24

a. Pengertian putusan lepas dari segala tuntutan hukum.....	24
b. Upaya hukum yang dimungkinkan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum.....	28
B. Kerangka Berpikir.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Ontslag Van Rechtsvervolging</i>) di Pengadilan Negeri Karanganyar.....	33
B. Kesesuaian Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (<i>Ontslag Van Rechtsvervolging</i>) Dikaitkan dengan Hukum Yang Berlaku.....	58
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
 DAFTAR GAMBAR	
 Hal.	
1. Kerangka Pemikiran.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang dan sedang membangun seperti negara kita, sangatlah perlu ditingkatkan secara terus-menerus karena peranan kesadaran hak dan kewajiban sangat penting dalam pencapaian tujuan negara itu sendiri. Begitu juga dalam upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara, hal yang lebih penting yaitu juga diperlukan kesadaran dari para aparat penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum dalam menggunakan kewenangannya, karena penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum akan berdampak buruk terhadap penegakan hukum itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha penegakan maupun usaha pemberantasan atau penindakan karena terjadinya pelanggaran hukum, atau dengan kata lain baik secara preventif maupun represif.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.

Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara

kita. Dengan demikian hukum di negara kita dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh penguasa ataupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut. Dimana penegakan hukum acara pidana juga harus ditegakkan.

Seperti kita ketahui tujuan dari hukum acara pidana adalah sebagai berikut “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemaksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Selain itu bahwa hukum acara pidana harus bisa membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak terjadi kesewenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga hak asasi manusia terjamin dengan baik. Untuk menjaga agar di dalam usaha menegakkan ketertiban hukum tersebut tidak terjadi kesewenang-wenangan dari petugas-petugas hukum maka pelanggaran hak asasi tersebut hanya dibenarkan menurut cara yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia atau disingkat KUHAP.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dimana masing-masing harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu sebagai penegak hukum, harus mempunyai moral dan kredibilitas yang tinggi dalam mengabdikan pada hukum sehingga keadilan dapat terwujud.

Dalam suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan (Oemar Seno Aji, 1997 ; 12)

Selain hal-hal tersebut diatas, yang mempengaruhi putusan hakim adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan apakah putusan pemidanaan, putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, berpegang pada surat dakwaan. Dimana setiap pelimpahan perkara dalam acara pemeriksaan biasa mengharuskan penuntut umum melengkapi pelimpahan berkas dengan “surat dakwaan”, dan surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2), memuat :

- unsur subjektif; berupa identitas lengkap Terdakwa tentang nama, tempat dan tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaan

- unsur objektif; berupa uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat unsur objektif, mengakibatkan dakwaan “batal demi hukum”. Fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan, mesti didasarkan dari isi surat dakwaan. Atas landasan surat dakwaan inilah ketua sidang memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti.

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1), tahap proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan dan jawaban. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap musyawarah hakim guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan Pengadilan. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Menurut Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam musyawarah hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dari hakim termuda sampai hakim tertua, sedangkan hakim ketua yang paling akhir memberikan pendapat. Semua pendapat harus didasari pertimbangan dan alasan yang tepat. Semua hasil musyawarah didasarkan pada permufakatan yang bulat (Pasal 182 ayat (2) KUHAP), kecuali setelah diusahakan tidak tercapai maka dapat menempuh dua cara yaitu :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Diambil pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa jika tidak diperoleh suara terbanyak (Pasal 182 ayat (6) KUHAP)

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Namun sering kali

putusan hakim menjadi kontroversi dan banyak ditentang oleh berbagai pihak, seperti putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum, biasanya Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum kepada Pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi. Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum hendaknya benar-benar mencerminkan keadilan, dimana harus didukung dengan bukti-bukti yang ada, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan keyakinan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana atau dengan adanya keadaan-keadaan istimewa sehingga terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum.

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Setelah putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini dijatuhkan, masih ada satu lagi hal yang perlu dicermati, yaitu apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena bukan tidak mungkin suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting sebagai pedoman dari masalah yang akan diteliti sehingga mempermudah penulis dalam membahas permasalahan serta dapat mencapai sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga tidak terlalu luas dan akan menjadi lebih terarah. Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut maka dapat dikemukakan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)?
2. Apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analitis penulis, khususnya dalam Hukum Acara Pidana
 - b. Untuk memperoleh data yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)
 - b. Untuk mengetahui apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) sudah sesuai dengan hukum yang berlaku

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja, tetapi juga harus berguna bagi semua pihak. Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya yang didapat atau

diperoleh dari perkuliahan dengan praktek di lapangan dalam bidang Hukum Acara Pidana khususnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai masalah-masalah yang ada sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut khususnya oleh mahasiswa Fakultas Hukum

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, dengan identifikasi secara sistematis norma-norma hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti. Karena dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) di Pengadilan Negeri Karanganyar apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif/juridis.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung tapi sudah berbentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut :

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*)
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diperoleh peneliti-peneliti terdahulu
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 : 24)

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh, sesuai dengan jenis data. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mencakup :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan dan bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Peraturan-peraturan lain yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, rancangan undang-undang dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

penulisan hukum ini antara lain berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan atau membahas tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001: 13)

6. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2006 : 21).

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti, penelusuran arsip-arsip dan dokumen resmi di tempat-tempat dimana data tersebut berada (dalam hal ini bentuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan perbandingan peraturan hukum yang mengatur tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum).

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini, penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Dalam setiap penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soerdjono Soekanto, 2006 : 251-252). Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan berbagai sumber lain

yang dimaksud oleh penulis untuk kemudian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Sesuai dengan jenis data yang deskriptif maka digunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan (Soerdjono Soekanto, 2006 : 252).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka sistematika dalam penelitian ini terdiri dari, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti meliputi : Tinjauan umum tentang putusan, tinjauan umum tentang pembuktian dan sistem pembuktian, tinjauan umum tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan yuridis terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta apakah putusan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Meliputi kesimpulan jawaban pada perumusan masalah dan saran-saran yang terkait dengan masalah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

a. Pengertian Putusan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonnis. Dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya tersebut. Dalam buku *Peristilahan Hukum dalam Praktek* yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 221, putusan diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat dibentuk tertulis maupun lisan. Kamus istilah hukum Fockema Andrea mengartikan kata “putusan” (*Vonnis*) sebagai “vonnis tetap” (*definitief*). Putusan yang diterjemahkan dari vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan (Leden Marpaung, 1992 :406)

Definisi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

b. Jenis-jenis Putusan Hakim

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP yaitu :

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut :

- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim

- b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim :

- (1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- (2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.

- (3) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini

lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.
(M.Yahya Harahap, 2003 : 348).

Jadi, hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.

2) Putusan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

- Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana.

Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata

- Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum.

Misalnya karena pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP (Leden Marpaung, 1992 : 411)

3) Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

c. Syarat Sah dan Isi Putusan

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa “Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP merumuskan secara rinci dan limitatif tentang isi putusan. Surat putusan pemidanaan menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP ini memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Pasal 197 ayat (2) berisi ancaman pembatalan jika terdapat kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti apa yang ditetapkan dalam ayat (1). Pasal 197 ayat (2) berbunyi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan ayat (2) KUHAP :

- a) Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban

- b) Kecuali yang tersebut dalam ayat (2) huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum

Dari ketentuan Pasal 195 dan Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya putusan pengadilan adalah:

- 1) Diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP)
- 2) Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP)

2. Tinjauan Tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian Tindak Pidana

a. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003: 10)

Pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pembuktian tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain :

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum,

terdakwa, atau penasehat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

- Bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman
- Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP

(M. Yahya Harahap, 2003: 273-274)

b. Macam-macam Alat bukti

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003:11).

Hukum acara pidana mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

berikut adalah uraian mengenai alat bukti diatas:

- 1) Keterangan saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP berbunyi : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu".

Pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi : "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"

Menurut penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP diatas, dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *Testimonium De Auditu*.

Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

- a) Syarat formil : bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.
- b) Syarat material : bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (Unus Testis Nulus Testis). Akan tetapi keterangan seorang saksi, adalah cukup

untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan (Darwan Prinst, 1998: 135-136).

2) Keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan". Pasal 186 KUHAP menyatakan : "Keterangan ahli adalah yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".

Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan penyidik di sidang acara diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP. Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran kehakiman, ahli balistik, ahli kimia, ahli fisika, ahli farmasi, ahli toxin dan lain-lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan (Darwan Prinst, 1998 : 141)

3) Surat

Tentang alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, sebagai berikut : surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

4) Petunjuk

Pengertian alat bukti petunjuk seperti tercantum dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Pasal 188 ayat (2) menyebutkan : petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a) keterangan saksi
- b) surat
- c) keterangan terdakwa

Dalam Pasal 188 ayat (3) disebutkan : “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

5) Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) mengatakan : "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri".

Keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja. Dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, kalau tidak didukung oleh alat bukti lainnya (Darwan Prinst, 1998 : 145)

c. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa, hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap

cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Ada beberapa teori sistem pembuktian, yaitu :

1) *Conviction in time*

- Yaitu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata
- Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, sehingga dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya

2) *Conviction Raisonee*

- Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan pula kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan oleh undang-undang
- Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas

3) Sistem Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk*)

- Yaitu sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan

4) Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

- Wettelijk : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang
- Negatif : adanya keyakinan (nurani) hakim , yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa

(Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003: 14-17)

Mengenai sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif

atau negatief wettelijk. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP, maka untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempunyai prinsip batas minimum, yaitu :

- 1) Kesalahan terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- 2) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (M. Yahya Harahap, 2003: 280)

Jadi jelaslah bahwa tanpa ada keyakinan dari hakim, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan, dan antara alat-alat bukti yang ada dengan keyakinan hakim harus ada hubungan sebab-akibat.

3. Tinjauan Umum tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)

c. Pengertian putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, namun tidak masuk dalam lingkup hukum pidana. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dalam persidangan memang terungkap bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak

dapat dipidana. Selain itu, ada keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dipidana

Undang-undang (Bab III KUHP) menentukan ada 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat pidana, ialah :

- 1) Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat (1))
- 2) Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48)
- 3) Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1))
- 4) Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat (2))
- 5) Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50)
- 6) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1))
- 7) Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2))

Menurut doktrin hukum pidana, 7 (tujuh) hal penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut, dibedakan dan dikelompokkan menjadi 2 (dua) dasar, yaitu :

- 1) Atas Dasar Pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Dasar pemaaf ialah :

- a) Ketidakmampuan bertanggung jawab

Pasal 44 ayat (1) merumuskan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Pasal 49 ayat (2) menyatakan “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan

jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

- c) Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik

Pasal 51 ayat (2) yaitu “Perintah jabatan yang diberi oleh pembesar yang tidak berhak, tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika dengan hati jujur pegawai yang dibawahnya menyangka bahwa pembesar itu berhak akan memberi perintah itu dari peri menjalankannya terletak dalam lingkungan kewajiban pegawai yang dibawah itu.”

- 2) Atas Dasar Pembenaar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat. Dasar pembenaar ialah :

- a) Adanya daya paksa

Pasal 48 berisi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”

- b) Adanya pembelaan terpaksa

Dalam Pasal 49 ayat (1) dikemukakan “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”

- c) Sebab menjalankan perintah Undang-undang

Pasal 50 : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”

- d) Sebab melaksanakan perintah jabatan yang sah

Tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) : “Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu

perintah jabatan yang diberi oleh pembesar yang berhak untuk itu’

Tidak dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf (*fait d’excuse*), ialah bahwa perbuatannya itu walaupun terbukti melanggar Undang-undang, yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya, dia dimaafkan atas perbuatannya itu.

Tidak dipidananya si pembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka si pembuatnya tidak dapat dipidana. Karena hapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar ((Adami Chazawi, 2002 : 18-19) dan (Moeljatno, 2000: 137-138))

Untuk lebih memahami putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dapat diperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang antara lain sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI. No. 39 K/Pid/1984 tanggal 28 Agustus 1984, yang menyatakan : “hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual-beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 2 (dua) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan”
- Mr. M. H. Tirtaamidjaja dalam buku “Kedudukan Hakim dan Jaksa” (Penerbit Fasco, Jakarta 1953) pada halaman 80 memuat contoh antara lain :

- a. Kepada terdakwa dituduhkan mengambil barang orang lain dengan tujuan akan memakainya untuk diri sendiri buat sementara waktu (ini bukan pencurian menurut pasal 362 KUHP)
 - Terdakwa dituduh telah membeli sesuatu barang dengan tidak mengetahui atau tidak menyangka bahwa barang itu didapat dari kejahatan, misalnya diperoleh dengan mencuri (ini bukan penadahan menurut pasal 480 KUHP)
 - Terdakwa dituduh melakukan suatu perbuatan atau pidana tertentu, tetapi ternyata bahwa ia tidak bertanggung jawab oleh karena gila (Pasal 44 KUHP); atau bahwa ia telah berbuat perbuatan pidana oleh karena didorong oleh sebab peksaan (*overmacht*) (pasal 48 KUHP)

(Leden Marpaung, 1992 : 412)
 - Putusan mahkamah Agung RI. No. 1160 K/Pid/1988, tanggal 21 Agustus 1990 : bahwa pengadilan negeri berpendapat, kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain (pembunuhan), akan tetapi amar putusannya berbunyi : melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena sakit jiwa.
- d. Upaya hukum yang dimungkinkan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)
- Pengertian “upaya hukum” dimuat dalam pasal 1 butir 12 KUHP, yaitu : “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Upaya hukum adalah suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggap kurang tepat. Maksud dari upaya hukum adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan juga sekaligus sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang hakim atau pengadilan. Mengenai upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1) Upaya hukum biasa

a) Perlawanan atau verzet

Verset yaitu perlawanan terdakwa atas putusan pengadilan di luar hadirnya terdakwa (Pasal 214 ayat (4) KUHAP) atau perlawanan penuntut umum atas penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya tuntutan penuntut umum atau pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara ataupun bukan merupakan kompetensi pengadilan yang bersangkutan (Pasal 149 dan 156 KUHAP)

b) Banding

Pasal 67 KUHAP berisi : “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Sehingga berdasarkan Pasal 67 KUHAP, jelas bahwa terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum mutlak “tidak dapat” diajukan Banding

c) Kasasi

Kasasi yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk meminta pembatalan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi karena :

(1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

- (2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- (3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Pasal 244 KUHAP : “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Berdasarkan pasal 244 KUHAP dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP halaman 106 dan 161, permintaan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan upaya hukum biasa yang dibenarkan undang-undang.

2) Upaya hukum luar biasa

a) Kasasi demi kepentingan hukum

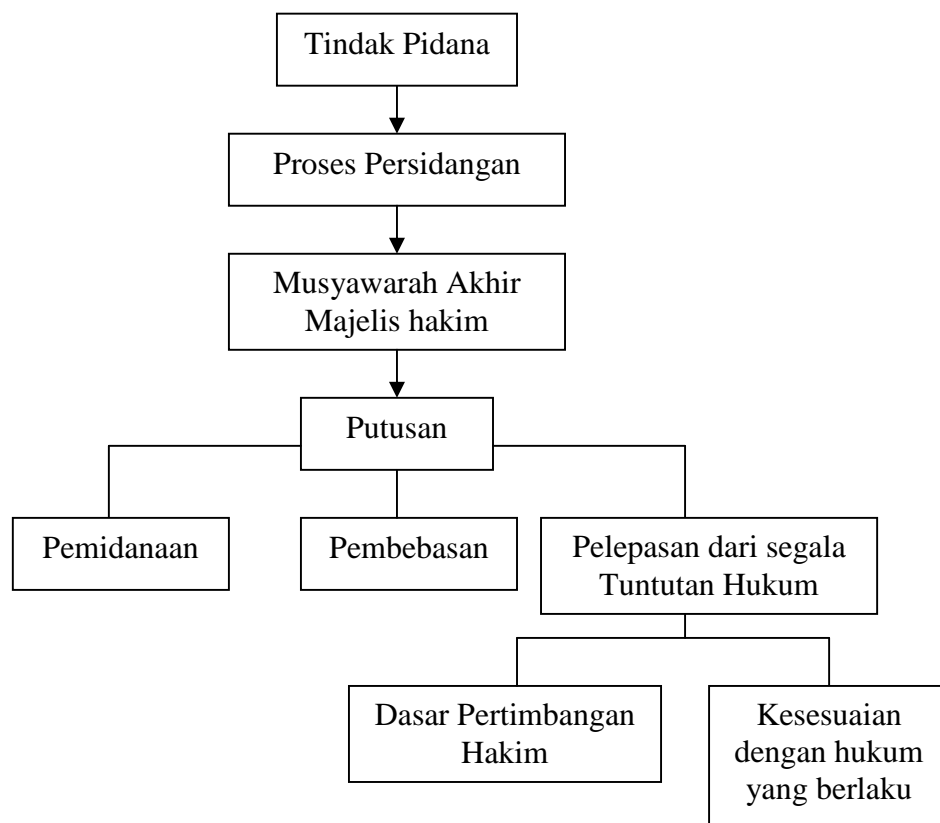
Pasal 259 ayat (1) KUHAP berbunyi “Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung”

b) Peninjauan Kembali

Pasal 263 ayat (1) : “Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Jadi disini jelas bahwa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.

B. Kerangka Pemikiran



Apabila terjadi suatu tindak pidana, kemudian dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, pada akhirnya akan didapat musyawarah akhir majelis hakim yang berupa putusan pemidanaan, pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Seperti dalam putusan hakim pada umumnya, dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Hakim harus benar-benar jeli dalam memeriksa suatu perkara sebelum hakim tersebut menjatuhkan putusan. Putusan hakim yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. Dimana harus dipertimbangkan mengenai bukti-bukti dalam

persidangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selain itu juga adanya keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum.

Setelah putusan dijatuhkan, masih harus dilihat lagi apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau tidak, karena apabila ternyata putusan yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dilakukan upaya hukum, dalam hal ini dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*) di Pengadilan Negeri Karanganyar

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti barang bukti serta alat bukti dan fakta di persidangan. Untuk mengetahui secara lebih rinci dan mendalam tentang dasar pertimbangan hakim tersebut, maka penulis akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 35/Pid. B/2002/PN. Kray. sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa :

Nama lengkap : MOCH. FACHRUDIN alias AMAT ;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur : 28 tahun ;
Tanggal lahir : 23 Maret 1973 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Puntukrejo Rt. 04 Rw. 10 Desa Ngringo,
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta

2. Dakwaan Penuntut Umum :

Bahwa ia Terdakwa MOCH. FACHRUDIN alias AMAT pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2002 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2001 s/d Januari 2002 bertempat tinggal di Dukuh Puntukrejo Rt.04 Rw.10 Desa Ngringo,

Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan suatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, saat saksi Ny. ALI alias SRI MURYANI kembali dari Klaten saksi melihat Terdakwa membawa senjata api, begitu saksi melihat Terdakwa membawa senjata api saksi keluar kerumah Bapak MENTO beberapa saat kemudian rumah saksi digerebek, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi ARIS KRISTIANTO, SUWANDI dan PUJI MARTANTO dan saat ditangkap Terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 352 (tiga ratus lima puluh dua) butir amunisi atau peluru serta 1 (satu) buah bom rakitan. Dan 352 (tiga ratus lima puluh dua) butir amunisi atau peluru merupakan peluru kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm yang biasanya peluru kaliber 5,56 mm, dapat ditembakkan dengan senjata kaliber jenis senapan otomatis seperti M.16 SSI, sedangkan peluru kaliber 7,62 mm. biasanya dapat ditembakkan dengan menggunakan senapan mesin seperti M.60 USA, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Semarang tanggal 15 Januari 2002, Nomor: 09/BSF/I/2002 ;
 - Bahwa Terdakwa menguasai senjata api, amunisi atau peluru dan bahan peledak tersebut tanpa dilindungi ijin dari pihak berwenang serta tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;
- perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1951 ;

3. Eksepsi

Dalam kasus ini, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi yang dimana kemudian Majelis Hakim memberikan putusan sela sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa
2. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 35/Pid.B/2002/PN.Kray. dengan Terdakwa MOCH. FACHRUDIN alias AMAT dilanjutkan

4. Pembuktian

Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang ;
- 352 (tiga ratus lima puluh dua) butir peluru ;
- 1 (satu) buah bom rakitan ;
- 1 (satu) buah accu kering ;

Selain barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Ny. **ALI alias SRI MURYANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi merupakan ibu kandung Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa anak pertama saksi dari perkawinannya dengan Ali;
- bahwa ALI (ayah Terdakwa) adalah pegawai PLN di Comal, Tegal;
- bahwa pada waktu itu tanggal 1 januari 2002 sekitar pukul 17.30 WIB terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa ;
- bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Terdakwa menginginkan mobil yang dipakai ayahnya di Comal untuk dibawa pulang dan akan dipakai oleh Terdakwa, sedangkan

- saksi tidak menyetujui dengan alasan mobil itu dipakai tidur ayahnya bila ayahnya tidak pulang ke Karanganyar ;
- bahwa karena Terdakwa jengkel dalam pertengkaran itu, terdakwa memukul kaca bufet hingga pecah ;
 - bahwa Terdakwa waktu marah-marah tersebut sambil membawa senjata laras panjang dan menakut-nakuti adiknya ;
 - bahwa karena takut (adiknya ELLYA) lari keluar rumah, dan masuk ke rumah tetangganya ;
 - bahwa dengan keluarnya ELLYA, kejadian itu diketahui oleh masyarakat, kemudian melaporkannya ke Polisi ;
 - bahwa kemudian Polisi datang, namun hanya diluar rumah saja ;
 - bahwa saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa ditangkap Polisi, karena saksi disuruh keluar oleh Terdakwa sambil marah-marah ;
 - bahwa setelah Polisi berhasil menangkap Terdakwa Polisi menggeledah rumah saksi dan menemukan senjata api laras panjang, bom rakitan sejenis mercon, peluru dalam jumlah banyak dan accu ;
 - bahwa saksi pernah melihat senjata api laras panjang itu dibawa oleh Terdakwa sebelum peristiwa itu, yang menurut pengakuan Terdakwa untuk berburu kijang di Bromo ;
 - bahwa senjata api laras panjang tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Klaten pada bulan Desember 2001 (7 hari sebelum lebaran) ;
 - bahwa saksi tidak tahu sebelumnya bila Terdakwa juga menyimpan peluru yang banyak ;
 - bahwa saksi tahu kalau ada bom rakitan sejenis mercon, peluru dalam jumlah banyak setelah Polisi menggeledah dan menemukan barang-barang tersebut dalam rumahnya ;
 - bahwa accu tersebut adalah accu organ (piano) ;
 - bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan senjata rakitannya tersebut dirumah ;

- bahwa Terdakwa pernah menggunakan senjata rakitannya untuk berburu kijang di Bromo, namun menurut pengakuan Terdakwa senjata itu tidak dapat dipergunakan (tidak bisa meletus) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki senjata api ;
- Bahwa dulu Terdakwa memiliki senapan angin untuk menembak burung
- Bahwa Terdakwa sering berburu dengan senapan angin tersebut dan membawa hasil tembakannya ke rumah ;
- Bahwa terdakwa sewaktu sekolah di SD dan SMP nilsi prestasinya sedang-sedang saja, namun sewaktu sekolah di STM II PGRI Surakarta pernah mendapat ranking ;
- Bahwa terdakwa semula bersikap sopan dan baik, namun sewaktu sekolah di STM dia pernah ditodong di gerbong kereta api dalam perjalanan menuju rumah omnya ;
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa berubah perilakunya antara lain sering ngomong sendiri, mudah terseinggung dan suka marah-marah;
- Bahwa setelah tamat dari STM, terdakwa melanjutkan kuliah komputer di Malang selama 1 tahun ;
- Bahwa terdakwa sering mengeluh pusing-pusing, kalau malam sulit tidur dan telapak tangannya selalu berkeringat ;
- Bahwa Terdakwa di rumah mendirikan bengkel sepeda motor yang dikerjakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa juga bisa merinci tentang jumlah biaya service dan penggantian onderdilnya ;
- Bahwa Terdakwa bercita-cita untuk mendirikan bengkel sepeda motor yang lebih besar ;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki seorang isteri dan seorang anak berumur 3 tahun ;
- Bahwa isteri dan anaknya tersebut sekarang ada di Yogya (kembali ke orang tuanya) ;

- Bahwa isterinya kembali ke Yogya sejak ia hamil 3 (tiga) bulan hingga sekarang ini, karena sering dimarahi Terdakwa ;
- Bahwa semula isterinya sering datang ke Terdakwa untuk meminta uang
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menengok isterinya ke Yogya karena dilarang oleh mertuanya sebelum Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

2. Saksi ARIS KRISTIANO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah anggota POLRI dari POLRES Karanganyar
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Januari 2002 sekitar pukul 22.00 WIB mendapat laporan dari anggota bila di dukuh Puntukrejo Desa Ngringo, Kecamatan jaten Karanganyar ada warga yang membawa senjata api ;
- bahwa kemudian saksi bersama team 4 (empat) anggota Polres mendatangi lokasi tersebut ;
- bahwa sewaktu saksi dan team sampai di lokasi telah banyak masyarakat disitu namun berada di luar rumah ;
- bahwa kemudian teman saksi (SUWANDI) masuk ke dalam rumah dan berhasil mnangkap Terdakwa ;
- bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak membawa senjata rakitan, namun dikantong celananya ditemukan beberapa peluru ;
- bahwa setelah diperiksa, Terdakwa mengaku/menerangkan dimana barang-barang yang ia punyai itu disimpan ;
- bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan ketempat sesuai pengakuan Terdakwa ;
- bahwa dari pengeledahan itu diketemukan :
 1. senjata api rakitan laras panjang yang disimpan di dalam organ

2. bom rakitan yang siap meledak yang di dalamnya sudah ada korek api, yang bila disambungkan dengan accu dapat meledak, diatas meja ruang tamu
 3. amunisi (peluru) caliber 5,56 mm dan caliber 7,62 mm sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) butir dalam kaleng yang disimpan dalam pesawat TV rusak
- bahwa peluru-peluru masih aktif karena terlihat di belakang peluru itu tidak ada bekas dipakai (masih utuh) ;
 - bahwa saksi belum pernah mencobanya ;
 - bahwa bom rakitan itu berisi bahan petasan dan dibungkus dengan kertas ditaruh biji korek api, sehingga kalau dihubungkan dengan kabel akan meletus ;
 - bahwa menurut pengakuan erdakwa di depan Penyidik amunisis dibeli dari Pati, sedangkan senjata terdakwa rakit sendiri ;
 - bahwa Terdakwa juga mengaku senjata itu dia buat karena kesal pada orangtua hingga senjata tersebut akan dipergunakan untuk menakut-nakuti orang tuanya ;
 - bahwa Terdakwa diperiksakan ke rumah sakit jiwa karena Terdakwa sering bicara sendiri ;
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya ;
 - atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;
- 3. Saksi SUWANDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Karanganyar ;
 - bahwa saksi pada tanggal 1 Januari 2002, sekitar pukul 20.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bila Terdakwa (MOCH. FACHRUDIN) mempunyai senjata api ;

- bahwa saat itu sekitar pukul 20.00 WIB saksi dengan satu team dari Kepolisian datang di tempat tinggal Terdakwa di dusun Puntukrejo, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, untuk penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- bahwa setelah team sampai di rumah Terdakwa terlebih dahulu saksi mengadakan penyelidikan, kemudian mendekati pintu dan bicara dengan Terdakwa ;
- bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 5 (lima) butir peluru ukuran 5,56 mm di kantong celananya ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa waktu itu, dia mengaku mempunyai senjata rakitan laras panjang yang disimpan di organ, peluru di kaleng roti yang disimpan dalam TV rusak dan bom rakitan di atas meja dan accu ;
- Bahwa setelah digeledah ditemukan peluru sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) butir, senjata rakitan laras panjang dan bom rakitan yang bila sumbunya disambungkan dengan accu akan meletus ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengadakan perlawanan sewaktu ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa sewaktu ditangkap di dalam rumah tidak ada orang lain kecuali Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui bila barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang dipergunakan untuk menakut-nakuti keluarganya
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki barang-barang tersebut ;
- Bahwa peluru tersebut setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang ternyata masih aktif ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa peluru itu ia beli di Pati ;
- Bahwa Terdakwa dalam tahanan Penyidik pernah diperiksa ke Rumah Sakit Jiwa, namun saksi tidak mengetahui hasilnya ;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya ;
- atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

4. Saksi PUJI MARTANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah anggota POLRI dari Polres Karanganyar ;
- bahwa pada tanggal 1 Januari 2002, sekitar pukul 20.00 WIB ada informasi dari masyarakat bila di dusun Puntukrejo, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Karanganyar ada orang yang memiliki senjata api ;
- bahwa kemudian dari Polres Karanganyar mengirimkan satu team (termasuk saksi) untuk mendatangi lokasi tersebut ;
- bahwa setelah team dari Polres Karanganyar sampai di lokasi sudah banyak warga masyarakat yang datang di situ ;
- bahwa setelah team mengadakan penyelidikan, teman saksi yang bernama SUWANDI berhasil membujuk Terdakwa untuk keluar ;
- bahwa setelah Terdakwa keluar, Terdakwa langsung di tangkap dengan tanpa perlawanan ;
- bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak membawa apa-apa, namun setelah diperiksa di dalam saku celananya ditemukan beberapa peluru ;
- bahwa atas pengakuan Terdakwa akhirnya Polisi berhasil menemukan barang lain yaitu senjata rakitan laras panjang, 352 (tiga ratus lima puluh dua) butir peluru dan bom rakitan ;
- bahwa nama Terdakwa adalah MOCH. FACHRUDIN alias AMAT ;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata api dari yang berwajib ;
- bahwa Terdakwa pernah diperiksakan ke Rumah Sakit Jiwa sewaktu ditahan oleh Penyidik ;

- bahwa pada waktu Terdakwa dalam tahanan tidak pernah mengamuk, namun bicaranya agak ngaco ;
- atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

5. Saksi ALI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa ;
- bahwa saksi adalah pegawai PLN di Comal yang setiap 2 (dua) minggu sekali pulang ke Karanganyar ;
- bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari empat bersaudara ;
- Bahwa semula anaknya adalah anak yang baik dan rajin, tetapi setelah terdakwa dirampok dan akan dibunuh di kereta api barang (tahun 1994), Terdakwa menjadi berubah ingatannya ;
- Bahwa perubahan yang terjadi pada diri Terdakwa tersebut antara lain: kalau diajak bicara sering tidak nyambung, suka memakai pakaian seperti tentara, kalau malam sulit tidur, sering loncat-loncat, tidak mau mandi dan tidak mau ganti pakaian dan jika tersinggung suka mengamuk
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebelum kejadian itu, karena saksi jarang di rumah ;
- Bahwa oleh ibunya Terdakwa pernah akan diperiksakan ke Rumah sakit Jiwa, namun Terdakwa tidak mau karena merasa dirinya tidak gila ;
- Bahwa saksi jarang bicara dengan Terdakwa, karena ia sering diam ;
- Bahwa Terdakwa pernah minya uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membuat bengkel, namun belum diberi karena belum punya ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah minta senjata api, namun saksi tidak menurutinya ;

- Bahwa Terdakwa pada tahun 1997 menikah dan mempunyai seorang anak ;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini sudah berpisah dengan isterinya, sejak isterinya dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saksi melihat barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, bahwa barang itulah yang diperlihatkan kepadanya sewaktu di kantor Polisi ;
- atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

6. Saksi ELLIA FASICA binti ALI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa ;
- bahwa pada tanggal 1 Januari 2002, sekitar pukul 17.00 WIB saksi yang sedang tidur, mendengar ada kaca yang di pecah ;
- bahwa kemudian saksi keluar kamar dan menegur Terdakwa;
- bahwa atas teguran saksi tersebut Terdakwa marah kepada saksi dan menyuruh semua orang yang ada di rumah keluar ;
- bahwa karena takut saksi keluar, pergi ke rumah tetangga ;
- bahwa ketika Terdakwa marah-marah dia sambil menenteng senjata api rakitan laras panjang ;
- bahwa senjata itu tidak ditodongkan kepada saksi, namun Terdakwa hanya mondar-mandir sambil berteriak “semua disuruh keluar kok tidak pergi-pergi” ;
- bahwa pada waktu itu Terdakwa sempat keluar rumah untuk membeli rokok dan berkata “laporkan saja saya ke Polisi” ;
- bahwa benar tidak berapa lama polisi datang atas laporan masyarakat;
- bahwa kemudian Polisi berhasil menangkap Terdakwa dan membawa barang-barang yang berhasil diketemukan di dalam rumah;

- bahwa saksi membenarkan bila barang yang diambil Polisi adalah barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;
- bahwa Terdakwa menjadi sering ngamuk setelah dirampok oleh preman tahun 1994 ;
- bahwa dulu Terdakwa orangnya baik dan rajin ;
- bahwa Terdakwa tidak pernah membuat onar dengan tetangga ;
- bahwa Terdakwa jarang mandi ;

7. Saksi SANTOSO alias DONGKRAK bin WAGIYO, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pada hari Minggu (tanggalnya lupa) saksi mengantar Terdakwa untuk membeli peluru di gudang milik bapak Sumari, di Desa Dukutalit Rt.05 Rw.03, Kecamatan Juwono, Kabupaten Pati ;
- bahwa waktu itu Terdakwa MOCH. FACHRUDIN alias AMAT membeli 3 (tiga) kilogram dari gudang bapak SUMARI dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya ;
- bahwa saksi tidak tahu jenis dan untuk apa peluru tersebut ;
- bahwa bapak SUMARI adalah pengrajin kuningan antara lain membuat komponen tangki, kran kompor dengan cara kuningan direbus kemudian dicetak sesuai bentuk yang diinginkan ;
- bahwa setelah selesai mengantar Terdakwa membeli peluru, saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;
- bahwa saksi membenarkan bila peluru itulah yang Terdakwa beli dari gudang milik bapak SUMARI ;

8. Saksi SUMARI, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi semula tidak kenal dengan Terdakwa ;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa bersama saksi SANTOSO alias DONGKRAK datang ketempat tinggal saksi (yang

- dipakai sebagai gudang barang rongsokan) untuk membeli barang bekas berupa peluru ;
- bahwa waktu itu Terdakwa membeli peluru sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
 - bahwa saksi lupa kapan Terdakwa membeli barang tersebut, namun masih tahun 1999 ;
 - bahwa saksi mendapatkan barang-barang tersebut dari para pemulung (pengumpul) yang menjualnya kepada saksi ;
 - bahwa saksi tidak ingat lagi pemulung siapa saja yang telah menjual barang tersebut kepada saksi ;
 - bahwa saksi tidak dengan sengaja membeli amunisi tersebut dari pemulung, karena saksi hanya membeli besi kuningan paling sedikit satu kwintal atau bahkan lebih ;
 - bahwa dengan cara pembelian tersebut saksi tidak mengetahui kalau barang rongsokan yang saksi beli bercampur dengan peluru ;
 - bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa membeli peluru tersebut;

Bahwa selain bukti saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan untuk didengar keterangannya di muka persidangan, saksi yang meringankan yaitu :

1. Saksi ISTIKHAROH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa yang menikah dengan Terdakwa pada tanggal 2 Maret 1997
- Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan kemudian saksi tetap tinggal bersama orang tua saksi di Yogya dan setelah 2 bulan pindah ke Palur, Karanganyar tempat orang tua Terdakwa karena Terdakwa bekerjanya di Karanganyar ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu bekerja di bengkel ;

- Bahwa setelah kurang lebih setengah tahun tinggal di orang tua Terdakwa, saksi pindah tinggal bersama nenek Terdakwa di Karanganyar;
- Bahwa setelah kurang lebih 5 bulan bersama nenek Terdakwa di Karanganyar saksi kembali ke orang tua saksi di Yogya, karena tidak tahan dengan perilaku Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah dengan saksi dan kalau marah sering memecah apa saja seolah ada kalainan dalam diri Terdakwa ;
- Bahwa banyak penyebab kemarahan Terdakwa tersebut yang menurut penilaian saksi tidak masuk akal misalnya saksi sebagai seorang wanita dipaksa membantu pekerjaan saksi dalam bengkel, dan karena saksi tidak bisa melakukan, Terdakwa menjadi marah-marah ;
- Bahwa bila Terdakwa marah-marah sering disertai dengan mengancam bila saksi akan dipukul atau dengan menodongkan senapan angin ;
- Bahwa Terdakwa sering pula memukul saksi hingga memar ;
- Bahwa Terdakwa sering berperilaku aneh, misal : tidak mau mandi, berpakaian dobel-dobel ;
- Bahwa kalau malam Terdakwa sulit tidur dan merenung sambil merokok dan bicara sendiri ;
- Bahwa Terdakwa suka memakai jaket tentara ;
- Bahwa terdakwa sering membawa senapan angin miliknya ke tempat tidur dengan alasan untuk jaga-jaga ;
- Bahwa karena saksi tidak tahan dengan keadaan tersebut, dalam keadaan hamil 4 bulan, saksi kembali ke orang tuanya di Yogyakarta;
- Bahwa setelah anaknya lahir dan berumur kurang lebih 1 tahun Terdakwa pernah datang ke Yogya untuk menjemput saksi agar kembali ke Karanganyar, namun saksi tidak mau karena takut dengan perilaku Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mau kembali kepada Terdakwa walaupun sembuh nanti ;
- Bahwa kalau dibandingkan, Terdakwa lebih banyak marahnya daripada mesranya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

2. Saksi Dr. DWI PRIYO HARTONO, SpKj. , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Dokter Umum Rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta
- Saksi pernah memeriksa Terdakwa MOCH. FACHRUDIN alias AMAT dengan 4 cara :
 1. Pemeriksaan Aloanamisis (terhadap lingkungan keluarganya) yaitu dengan ayah, ibu, isteri dan saudaranya
 2. Pemeriksaan Autoenamisis terhadap pasien
 3. Dengan Observasi setiap hari selama 6 hari
 4. Pemeriksaan tambahan meliputi pemeriksaan psikologi, evaluasi sosial, pemeriksaan laboratorium dan Elextro Encephalografi
- Bahwa dari pemeriksaan Aloanamisis didapat hasil pemeriksaan bila Terdakwa terdapat gejala psikopatologi tersamar yang tidak disadari oleh keluarganya sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu
- Bahwa sejak itu Terdakwa telah menunjukkan perilaku yang aneh yaitu : sering berpakaian ABRI, kalau tidur selalu membawa senjata (senapan angin) agar ia merasa aman dari gangguan, pendidikannya menjadi tidak lancar karena bosan, begitu pula tempat tinggalnya selalu pindah-pindah
- Terdakwa juga selalu cemburu dan curiga pada orang lain, sehingga hubungan dengan isterinya tidak harmonis

- Terdakwa selalu curiga, pencemburu sering mengamuk dan memukul serta pernah menodongkan senjata senapan angin kepada isterinya maka isterinya takut dan pulang ke orangtuanya
- Pada pemeriksaan observasi diketahui bila Terdakwa mudah kecewa dan frustrasi, condong pendendam terutama kepada ayahnya
- Terdakwa cenderung tidak bisa menguasai diri, perilaku penuh kecurigaan dan perilaku Terdakwa selalu terbawa oleh halusinasinya (menurut dunianya sendiri)
- Sikap dan tingkah laku Terdakwa waspada, psikomotor, tenang dengan efek : iritabel, kadang-kadang depresi, hidup emosi tidak serasi dan sulit dirabaraskan
- Pemeriksaan Psikologik Terdakwa terdapat gejala psikopatologi, cenderung tidak bisa menguasai diri, perilaku penuh kecurigaan
- Bahwa pada evaluasi sosial Terdakwa terdapat handaya dalam hubungan sosial, handaya dalam pekerjaan dan perawatan diri (tidak mau mandi) sering cekcok dengan keluarga
- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan, Terdakwa menderita gangguan jiwa berat (Psikotik), sehingga memerlukan pengobatan secara teratur dan perawatan rutin
- Bahwa orang yang menderita gangguan jiwa berat, ia tidak mampu memahami perbuatannya dan resiko yang diakibatkan
- Bahwa gangguan jiwa berat (Psikotik) disebabkan karena konflik dalam keluarga maupun karena faktor keturunan atau akibat stres berat
- Bahwa orang yang menderita psikotik tidak mengalami kemunduran dalam intelegensinya
- Bahwa orang yang menderita psikotik tetap mempunyai cita-cita, namun kehidupan menuju masa depan terganggu (tidak teratur)
- Bahwa saksi tidak tahu akan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Selain itu, dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa benar mempunyai senjata api rakitan yang sekarang diajukan sebagai barang bukti
- Bahwa senjata api itu Terdakwa sendiri yang membuat pada bengkel las di Klaten
- Bahwa senjata itu ada pelurunya yang dia beli bersama teman Terdakwa yang bernama Dongkrak di Pati
- Bahwa Terdakwa lupa berapa banyak peluru yang ia miliki
- Bahwa senjata api itu akan dipergunakan untuk menakut-nakuti ayahnya, karena ayahnya tidak mau mengganti kayu glugu yang ada di dapur
- Bahwa senjata itu pernah Terdakwa coba di Bromo namun tidak bisa meletus
- Bahwa setelah peluru dibakar, kemudian pelatuknya ditarik sampai tiga kali baru bisa meledak
- Bahwa Terdakwa baru sekali mencoba
- Bahwa Terdakwa juga pernah menakut-nakuti keluarganya kalau ia sedang marah
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal bersama orang tuanya dan 3 (tiga) orang adiknya
- Bahwa Terdakwa membuat senjata api itu atas perintah si Kribo, penasehat Spiritualnya
- Bahwa Terdakwa juga membuat mercon besar seperti bom rakitan bersama Wahyu temannya waktu SD
- Bahwa petasan itu untuk mencari ikan
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya
- Bahwa Terdakwa pernah didatangi petugas dari Kepolisian Karanganyar

- Bahwa pada waktu polisi menangkap Terdakwa dan menyita barang milik Terdakwa yaitu : senjata api rakitan laras panjang, bom rakitan, peluru dan accu untuk, membunyikan organ
- Bahwa senjata api rakitan pada waktu itu disimpan dalam kaleng roti dan ditaruh dalam pesawat TV rusak
- Bahwa bom rakitan di luar organ

5. Tuntutan

Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganya memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FACHRUDIN alias AMAT terbukti bersalah melakukan perbuatan tanpa hak memiliki, menguasai senjata api, amunisi atau bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCH. FACHRUDIN alias AMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

6. Pertimbangan Hakim

Menimbang selain keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, juga terdapat alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Psychiatrium Nomor : 343/YM.01.02 tertanggal 11 Februari 2002 atas nama MOCH. FACHRUDIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR. DWI PRIYO HARTONO, SpKj., dengan kesimpulan bahwa pasien menderita gangguan jiwa berat (Psikotik) sehingga memerlukan pengobatan secara teratur dan perawatan secara rutin ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta Visum Et Repertum Psychiatrium, karena bersesuaian satu sama lain, maka didapat fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2002, sekitar pukul 17.00 Terdakwa marah dalam rumahnya dengan memecah kaca bufet
- Ketika Terdakwa marah, sambil membawa senjata rakitan laras panjang yang ditodongkan kepada ibunya (saksi SRI MURYANI) maupun kepada adiknya (saksi ELLIA FASICA) sambil menyuruh semua orang yang ada dalam rumah agar keluar
- Saksi ELLIA FASICA takut, maka ia keluar dari rumah itu dan masuk ke rumah tetangganya,
- Setelah warga melapor kepada yang berwajib, maka datanglah 4 (empat) orang polisi ke tempat tinggal Terdakwa
- Setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas di dalam saku celananya ditemukan 5 (lima) butir peluru
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa sewaktu diinterogasi berhasil ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang disimpan dalam organ, 352 (tiga ratus lima puluh dua) butir peluru yang ditaruh dalam kaleng dan disimpan dalam TV rusak dan mercon besar seperti bom yang sumbunya dihubungkan dengan accu di ruang tamu
- Barang-barang tersebut adalah milik terdakwa :
 1. Senjata api dibuat sendiri di Klaten
 2. Peluru dibeli dari pati
 3. Petasan dibuat sendiri oleh Terdakwa
- Barang-barang tersebut dimaksudkan untuk menakuti ayahnya karena hubungan yang kurang harmonis antara Terdakwa dengan ayahnya
- Senjata api tersebut baru dicoba satu kali di bromo
- Sewaktu senjata api tersebut dicoba mulanya tidak bisa meletus baru setelah dibakar dan ditarik pelatuknya sebanyak tiga kali bisa meletus

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa kemudian terjadilah hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang untuk jelasnya seperti tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah masuk dan turut dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang , 352 (tiga ratus lima puluh dua) butir peluru, 1 (satu) buah petasan besar seperti bom dan accu kering telah disita menurut hukum, maka barang-barang tersebut dinyatakan berlaku sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, telah diputus dengan putusan sela No. 35/Pid.B/2002/PN.Kray. tanggal 22 Mei 2002, maka putusan sela tersebut merupakan bagian dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 12 Tahun 1951, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa bunyi selengkapnya Pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana

dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 12 Tahun 1951 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Unsur tanpa hak
3. Memiliki, menyimpan senjata api, amunisi, atau bahan peledak

ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa unsur ini menunduk kepada subjek hukum ialah orang yang diajukan ke muka persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa MOCH. FACHRUDIN alias AMAT yang didalam persidangan telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak

- Tanpa hak artinya adalah tidak adanya alasan yang membenarkan atau memperbolehkan bagi seseorang atau suatu hal;
- Bahwa apakah terdakwa MOCH. FACHRUDIN alias AMAT mempunyai alasan yang membenarkan atau memperbolehkan untuk memiliki atau menguasai senjata api rakitan, amunisi dan bom rakitan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;
- Bahwa di persidangan Terdakwa MOCH. FACHRUDIN alias AMAT yang sehari-harinya berprofesi sebagai pekerja bengkel

tentunya tidak mengharuskan adanya senjata api untuk menunjang pekerjaannya;

- Bahwa di persidangan juga terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi : Ny. ALI alias SRI MURYANI, SUWANDI dan PUJI MARTANTO yang sama-sama menerangkan bila terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai, memiliki ataupun menyimpan barang-barang tersebut;
- Dengan demikian unsur dengan tanpa hak telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan senjata api ataupun bahan peledak

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang saling berkaitan satu sama lain sehingga didapat sebagai fakta bahwa pada Desember 2001 (tujuh hari sebelum hari raya lebaran) Terdakwa membawa senjata api rakitan laras panjang yang didapat dari Klaten;
- Bahwa kemudian dengan bantuan saksi SANTOSO alias DONGKRAK bin WAGIYO, Terdakwa mendapatkan peluru dengan cara membeli di tempat penjualan barang-barang di Pati dari saksi SUMARI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ny. ALI alias SRI MURYANI, saksi ELLIA FASICA binti ALI dan keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa MOCH. FACHRUDIN alias AMAT pernah mencoba senjata itu di Bromo namun pada mulanya tidak mau meletus, baru setelah peluru itu dibakar dan ditarik pelatuknya hingga tiga kali baru meletus;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi ARIS KRISTANTO, SUWANDI dan PUJI MARTANTO yang saling berkaitan yang menerangkan bila setelah para saksi mendapat laporan dari masyarakat bila di Dukuh Puntukrejo Rt. 04 Rw. 10, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, ada orang yang mengamuk dengan membawa senjata api,

- Berdasarkan laporan tersebut para saksi yang beranggotakan empat orang mendatangi tempat tinggal Terdakwa dengan alamat diatas;
- Bahwa setelah mereka para saksi sampai di tempat kejadian perkara (TKP) dan berhasil menangkap Terdakwa MOCH. FACHRUDIN alias AMAT, berdasarkan pengakuan Terdakwa para saksi berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang disimpan dalam organ, 352 (tiga ratus lima puluh dua) butir peluru dalam kaleng roti dari dalam pesawat TV rusak, dan 1 (satu) buah petasan besar semacam bom rakitan yang dirangkai dengan accu yang sewaktu-waktu akan meletus di ruang tamu;
- Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa MOCH. FACHRUDIN alias AMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsi maupun dalam pembelaannya mendalilkan bila Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Psikotik), sehingga sesuai dengan pasal 44 KUHP, Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dilepaskan dari segala tuntutan, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ny. ALI alias SRI MURYANI, saksi ALI dan saksi ELLIA FASICA, yang semuanya menerangkan bila Terdakwa semula orangnya adalah baik, ramah dan pandai. Namun sejak Terdakwa ditodong oleh preman-preman dalam gerbong kereta api pada tahun 1994, maka Terdakwa berubah perilakunya. Terdakwa menjadi pemurung, sering melamun, suka berpakaian seperti tentara, sering marah-marah, kalau malam sulit tidur dan suka bicara sendiri serta adanya rasa cemas, perasaan takut yang berlebihan, sehingga bila tidur Terdakwa selalu membawa senapan angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan isteri Terdakwa (saksi ISTIKHAROH), menerangkan bila sewaktu saksi tinggal serumah dengan Terdakwa, suaminya menunjukkan perilaku yang aneh, misal : jarang mandi, berpakaian dobel-dobel, kalau malam sulit tidur, sering bicara sendiri, sering marah-marah yang disebabkan oleh suatu sebab yang tidak dapat diterima akal saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. DWI PRIYO HARTONO, SpKj. Yang menerangkan bila saksi pernah melakukan pemeriksaan selama 6 (enam) hari terhadap Terdakwa MOCH. FACHRUDIN alias AMAT telah menderita gangguan jiwa kurang lebih sejak 15 tahun yang lalu dengan gejala tersamar, sehingga karena gejala ini tersamar maka keluarga tidak menyadarinya. Gejala tersebut terlihat dengan perubahan yang menunjukkan tingkah laku aneh, Terdakwa yaitu sering berpakaian seperti ABRI selalu bersikap waspada dan curiga kepada orang lain;

Bahwa setelah Terdakwa menikah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu menunjukkan gejala yang kuat, sehingga Terdakwa sering memukul isterinya sambil menodongkan senapan;

Bahwa saksi juga menerangkan pada kurun waktu satu tahun terakhir Terdakwa menunjukkan gejala sedang yaitu adanya handaya hubungan sosial, handaya dalam pekerjaan dan perawatan diri, sehingga hubungan dengan keluarga tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan selama persidangan ternyata Terdakwa berperilaku aneh, misal : pandangannya selalu kosong, suka berteriak-teriak sambil matanya melotot, mulutnya berkamat-kamit, sering melamun, dan kalau ditanya tidak jelas jawabannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Psikotik);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat, sesuai dengan pasal 44 KUHAP tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dihukum dan oleh karena itu Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara, untuk segera dilakukan pengobatan secara rutin oleh keluarganya ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 352 (tiga ratus lima puluh dua) butir peluru dan 1 (satu) buah petasan besar seperti bom yang dirangkai dengan accu, karena tidak dilindungi surat ijin dari yang berwenang, maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya yang timbul dari perkara ini disebabkan kepada negara ;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 44 KUHAP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait ;

AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FACHRUDIN alias AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat, memiliki dan menyimpan senjata api, amunisi dan bahan peledak” ;
2. Menyatakan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Psikotik), sehingga tidak dapat dihukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang ;
- 352 (tiga ratus lima puluh dua) butir peluru
- 1 (satu) buah petasan besar seperti bom yang dirangkai dengan accu kering ;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

B. Kesesuaian Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*) dengan Hukum Yang Berlaku

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, mengacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pertimbangan hakim secara umum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Misalnya karena pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.

Dalam kasus yang penulis dapat di Pengadilan Negeri Karanganyar, penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah karena terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit, sesuai dengan rumusan Pasal 44 KUHP.

Menurut penulis, dalam kasus ini Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi yang kemudian majelis hakim mengeluarkan putusan sela yang menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut. Menurut penulis, putusan sela tersebut sudah tepat, karena walaupun berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatrium Nomor : 343/YM.01.02 tertanggal 11 Februari 2002 yang menyatakan bahwa Terdakwa menderita gangguan jiwa berat (Psikotik), namun untuk memutuskan apakah Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, perlu pembuktian dimuka persidangan. Dimana yang harus memutuskan terdakwa kurang mampu atau tidak mampu secara keseluruhan untuk bertanggung jawab dan menentukan akibat hukumnya adalah hakim. Dalam mengambil keputusan, ahli penyakit jiwa hanya mempunyai tugas memberikan nasihat, walaupun nasihat tersebut mempunyai kekuatan meyakinkan. Pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan diperlukan, disertai dengan keterangan dari ahli penyakit jiwa yang mempunyai kekuatan mengikat dan meyakinkan dimuka persidangan, tidak hanya berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatrium yang terdapat dalam berkas perkara, sehingga dapat meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila didapat keyakinan hakim bahwa Terdakwa benar mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari tuntutan hukum, bukan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum.

Penjatuhan putusan lepas dari tuntutan hukum berkenaan dengan tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena jiwa cacat dalam pertumbuhannya, dan jiwa terganggu karena penyakit, adalah berdasar rumusan Pasal 44 KUHP. Dimana Pasal 44 KUHP merumuskan :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau

terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan

- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri

Dari norma yang dirumuskan pada ayat (1), ada 2 penyebab tidak dipidanya berhubungan dengan tidak mampu bertanggungjawabnya si pembuat yang terbukti melakukan tindak pidana yaitu :

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya
 - Jiwnya cacat dalam pertumbuhan adalah suatu cacat jiwa (abnormal) yang melekat pada seseorang sejak kelahirannya, misalnya ambiciil, idiot, bisu tuli sejak lahir dan sebagainya.
2. Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit
 - Pada terganggu jiwanya karena penyakit, keadaan jiwa yang abnormal itu diderita bukan sejak lahir, melainkan setelah lahir misalnya gila, epilepsi.
 - Gangguan jiwa ini baik fisik maupun psikis

Undang-undang tidak memberi keterangan yang lebih jelas tentang tidak mampu bertanggungjawab, di dalam MvT ada keterangan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab ialah :

- Apabila si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang
- Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. (Sudarto, 1990:94)

Pasal 44 ayat (1) tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab, melainkan sekedar menyebut tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan bilamana keadaan orang yang mampu bertanggung

jawab tidak dijelaskan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ialah bilamana dalam perbuatan itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 44 ayat (1) tersebut.

Dalam praktik hukum, sepanjang si pembuat tidak memperlihatkan gejala-gejala kejiwaan abnormal, maka keadaan jiwa tidak dipermasalahkan. Sebaliknya ketika tampak gejala-gejala abnormal, maka gejala-gejala itu akan diselidiki apakah gejala-gejala yang tampak itu sungguh-sungguh benar dan merupakan alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 44 ayat (1). Penyelidikan ini penting, dalam rangka mencapai keadilan dari suatu vonis hakim. Tidak patut dan oleh karenanya tidak adil mempidana si pembuat yang sebenarnya dia mengidap suatu kelainan jiwa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) tersebut.

Dua keadaan jiwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) adalah keadaan jiwa sebagai penyebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya atas semua perbuatannya. Dengan kata lain keadaan jiwa disitu berlaku untuk segala macam bentuk perbuatan. Oleh karena itu sifatnya umum. Disamping itu ada pula keadaan jiwa yang orangnya tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang sifatnya khusus, artinya hanya berlaku untuk perbuatan tertentu saja. Sedangkan pada perbuatannya yang lain, ia tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan perbuatannya itu sendiri serta keadaan-keadaan obyektif dan atau subyektif tertentu ketika seseorang itu berbuat. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab secara khusus ini adalah :

- Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang ia lakukan
- Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi atas suatu perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan yang tercela.

Keadaan jiwa yang disebut dengan jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige intwikkeling*) dan terganggunya jiwa karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak terdapat penjelasan lebih jauh dalam undang-undang.

Ada tiga cara yang dapat digunakan dalam rangka menyelidiki keadaan jiwa si pembuat untuk menentukan apakah si pembuat berada dalam keadaan tidak mampu bertanggungjawab, yaitu :

- dengan *methode biologis*, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab
- dengan *metode psychologis* dengan menyelidiki ciri-ciri psychologis yang ada yang kemudian dari ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggungjawab ataukah tidak
- dengan *metode gabungan* ialah kedua cara tersebut diatas digunakan secara bersama-sama. Disamping menyelidiki tentang gejala-gejala abnormal juga dengan meneliti ciri-ciri psychologis orang itu, untuk menarik kesimpulan apakah dia mampu bertanggungjawab ataukah tidak (Adami Chazawi, 2002 : 20-27)

Menurut analisis penulis, dalam kasus ini hakim dalam menjatuhkan putusannya, selain melihat barang bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta melihat sikap-sikap Terdakwa di persidangan, hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli, yang dimana dalam keterangannya memberikan hasil penelitian terhadap kejiwaan Terdakwa apakah terganggu atau tidak sehingga pada akhirnya mempengaruhi terhadap putusan yang dijatuhkan. Keterangan ahli berpengaruh besar dalam kasus ini, karena dengan diadikannya ahli yang berkompeten di bidangnya, hakim dapat lebih yakin mengenai keadaan jiwa terdakwa. Selain dari keterangan saksi ahli yang berkompeten di bidangnya, hakim juga telah mendengar keterangan orang-orang terdekat terdakwa yang dalam keterangannya dapat mendukung keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah benar-benar terganggu jiwanya.

Keterangan ahli oleh dokter ahli jiwa (psychiater) di sidang pengadilan tentang keadaan jiwa si pembuat tidaklah wajib diikuti oleh majelis hakim. Dengan berbagai pertimbangan terhadap fakta-fakta yang ada dan terungkap dipersidangan baik mengenai orang itu sendiri maupun perbuatannya beserta hal-hal lain sekitar perbuatan, majelis hakim berhak menggunakan pendapatnya sendiri tanpa memakai keterangan ahli oleh seorang ahli jiwa dalam memutuskan tentang ada tidaknya kecacatan jiwa dan penyakit jiwa yang mengganggu akalnya. Akan tetapi oleh adanya alasan bahwa hakim pada umumnya bukanlah ahli di bidang kejiwaan, maka sewajarnya pendapat ahli jiwa itu dipertimbangkan untuk memperkuat pendapatnya atau menjadi dasar pendapatnya. Tentang bagaimana cara yang sebaiknya bagi Majelis hakim dalam menyelidiki untuk memperoleh keyakinan yang obyektif, artinya sesuainya antara keyakinan yang terbentuk dengan kebenaran materiil (sesungguhnya) tentang keadaan jiwa si pembuat itu, diserahkan pada masing-masing hakim.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan setelah melihat tingkah laku terdakwa di persidangan persidangan, didapat keyakinan bahwa terdakwa benar menderita suatu gangguan jiwa berat (Psikotik), sehingga terdakwa tidak mengerti apakah perbuatan yang dilakukan salah atau benar, merugikan orang lain atau tidak. Dalam keterangannya, terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa membuat senjata api atas perintah si Kribo, penasehat Spiritualnya, yang tentu tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia normal. Terdakwa terganggu jiwanya karena penyakit yang tidak diderita sejak lahir melainkan sejak dirinya dirampok dan akan dibunuh di kereta api barang tahun 1994, sehingga terdakwa menjadi berubah ingatannya dan bertingkah laku aneh. Berdasarkan uraian penulis diatas, penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini sudah

memenuhi rumusan Pasal 44 KUHP yaitu peniadaan pidana terhadap seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dalam hal terdapatnya keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya atau keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, hakim dapat memutus dengan menjatuhkan tindakan (*maatregel*) dengan memerintahkan si pembuat untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan, sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat 2. Tindakan bukanlah suatu pidana walaupun dapat dirasakan sebagai pengekangan kebebasan bergerak seperti pada pidana penjara atau pidana kurungan.

Penulis berpendapat dalam kasus ini, hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan dengan memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara, untuk segera dilakukan pengobatan secara rutin oleh keluarganya. Dimana penjatuhan tindakan tersebut dimaksudkan selain untuk menolong kesembuhan Terdakwa juga di dalamnya ada sifat preventif atas kemungkinan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkannya terhadap masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 35/Pid. B/2002/PN. Kray tentang Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*) adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, yaitu :
 - a. Atas Dasar Pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Dasar pemaaf ialah :
 - Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat (1))
 - Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexes*, Pasal 49 ayat (2))
 - Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2))
 - b. Atas Dasar Pembeda (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat. Dasar pembeda ialah :
 - Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48)
 - Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1))
 - Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50)
 - Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1))

2. Kesesuaian putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*) dikaitkan dengan hukum yang berlaku, menurut penulis putusan yang dijatuhkan adalah sudah tepat karena setelah melalui proses persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, didapat keyakinan hakim bahwa terdakwa benar mengalami gangguan kejiwaan seperti terdapat dalam rumusan Pasal 44 dimana terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Selain itu dengan memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara, untuk segera dilakukan pengobatan secara rutin oleh keluarganya, adalah sudah tepat karena tindakan tersebut dimaksudkan selain untuk menolong kesembuhan Terdakwa juga di dalamnya ada sifat preventif atas kemungkinan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkannya terhadap masyarakat.

B. SARAN

1. Hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada hukum yang berlaku, walaupun hakim memiliki kedudukan dan kekuasaan yang mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah
2. Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan dengan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga akan menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak serta masyarakat
3. Hakim dalam memutus perkara dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*) harus benar-benar berdasarkan hal-hal yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-undang dan didukung oleh keyakinan hakim

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku :

- A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987. *Surat Dakwaan*. Bandung : Alumni
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Dalam Praktik*. Jakarta : Djambatan
- Djoko Prakoso, 1986. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju
- . 2003. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Bandung : Mandar maju
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Oemar Seno Aji. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali
- . 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press

Dari Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Yurisprudensi Indonesia